

## **Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani**

*Suharko\**

### **Abstract**

*New social movement can be perceived both as a new type of social movements and as a new social science paradigm. The article refers new social movement as the new type of social movements. It article describes and analyzes repertoar of peasant movements in Indonesia as part of new social movement. Peasant movements in Indonesia are actually part of anti globalization movement which have quite similar characteristics with new social movements.*

**Kata-kata Kunci:**  
*gerakan social; gerakan sosial baru; gerakan petani*

### **Pengantar**

Isu tentang gerakan sosial baru (GSB) atau *new social movement* (NSM) akhir-akhir ini gencar mewarnai wacana dan perdebatan di kalangan aktivis gerakan dan akademisi. Bagi kalangan aktivis sosial yang biasa bergiat di sektor NGO/Ornop, gerakan sosial dilihat sebagai suatu pilihan aktivisme yang relevan dengan konteks perubahan ekonomi politik yang secara pekat didominasi oleh ideologi dan praktik-praktik neoliberalisme. Fakih (2003), misalnya, mengajurkan bahwa

---

\* *Suharko* adalah staf pengajar Jurusan dan Program Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui e-mail: suharko@ugm.ac.id

sudah saatnya para aktivis Ornop menempuh jalan penguatan gerakan sosial sebagai alternative wacana dan praksis terhadap praksis penguatan masyarakat sipil (*civil society*) yang selama ini ditekuninya karena praksis tersebut sebenarnya merupakan bagian dari agenda besar neoliberalisme. Ornop yang gencar mengkampanyekan isu dan praksis gerakan sosial adalah Insist, melalui penerbitan jurnal dan buku-buku. Sekedar menunjuk contoh antara lain jurnal *Wacana* Edisi 11 tahun 2002 tentang 'Gerakan Sosial Baru', *Gelombang Perlawanan Rakyat*, kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia (2003), dan lain-lain. Ornop lain yang aktif mendorong hadirnya praksis gerakan sosial di Indonesia adalah Cindelaras - *Institute for Rural Empowerment and Global Studies*, melalui penerbitan buku-buku tentang kajian globalisasi, terutama berfokus pada dampak-dampak globalisasi, misalnya I. Wibowo & F. Wahano (2003), IFG (2003), Madeley (2005), dan lain-lain.

Kalangan akademisi ilmu sosial juga mulai menaruh minat yang makin meningkat terhadap kajian gerakan sosial. Meningkatnya frekuensi, intensitas, dan cakupan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai aksi kolektif/massa mengiringi proses transisi politik di Indonesia agaknya telah mengantar ilmuwan sosial untuk merujuk kepada perspektif-perspektif teori gerakan sosial. Beberapa terbitan yang bisa dirujuk adalah Arief Budiman & Olle Tornquist. (2001), A.E. Priyono et.al (2003), Wahyudi (2005), Majalah *Basis*, No. 01-02, Januari-Februari, 2006.

Dari jejak rekam sejarah, gerakan sosial sebenarnya bukan isu baru. Sejak era kolonialisme Belanda, gerakan sosial muncul melalui pemberontakan petani dan gerakan nasionalisme pada awal abad ke-20. Sejak era pasca kemerdekaan dan terutama pada masa Orde Baru dalam segala keterbatasan ruang geraknya berkembang gerakan demokrasi, feminism, hak-hak asasi manusia, dan gerakan lingkungan. Sementara ragam gerakan tersebut terus berlanjut dan makin menguat seiring dengan tersedianya ruang gerak politik yang lebih luas, sejak akhir tahun 1990-an gerakan 'anti-globalisasi' (gerakan sosial melawan globalisasi ala neoliberal) mewarnai praksis gerakan sosial di Indonesia sebagaimana tercermin dari gerakan pembaruan agrarian, pertanian yang berkelanjutan, penguatan masyarakat adat, anti hutang luar negeri, dan lain-lain.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan penggalan kisah tentang gerakan sosial baru di Indonesia dengan fokus pada gerakan petani sebagai bagian dari gerakan anti-globalisasi. Teori gerakan sosial baru dipergunakan untuk memahami dan menjelaskan karakter-karakter menonjol yang dimiliki oleh gerakan petani akhir-akhir ini. Penggalan kisah gerakan petani yang dipaparkan adalah gerakan petani di Batang, di Pasundan (Garut, Ciamis dan Tasikmalaya), di Sumatera Utara, serta jejaring gerakan petani nasional. Deskripsi data yang disajikan diambil dari buku, laporan, berita media massa, situs-situs internet yang relevan. Namun, sebelum tulisan ini mengarah kepada pokok-pokok persoalan tersebut, terlebih dulu dipaparkan tentang konsep gerakan sosial yang dirujuk, asal muasal munculnya GSB dan karakter-karakter dasar dari GSB.

### Konsep Gerakan Sosial

Seturut dengan perkembangan kisah-kisah gerakan sosial yang makin beraneka ragam, tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Definisi senada dirumuskan oleh seorang teoritis terkemuka Sydney Tarrow (1998: 4), gerakan sosial adalah tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Dari dua definisi ini, gerakan sosial merupakan gerakan kolektif yang bersifat menentang untuk mencapai tujuan kolektif pula.

Ini merupakan definisi yang luas, karena gerakan sosial memiliki ragam yang variatif. Gerakan sosial bisa memiliki partisipan yang sangat sedikit hingga ribuan bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa pula beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok 'bawah tanah' (*underground groups*).

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (*contentious politics*). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*cycles*

*of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa, sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah dan menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumberdaya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk – singkat atau berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Kebanyakan tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti negara.

Selanjutnya, gerakan sosial perlu dibedakan dari sejumlah pengorganisasian sosial berikut. Pertama, meskipun berbeda, gerakan sosial dan organisasi formal kadang-kadang memiliki batasan yang kabur, karena gerakan sosial yang berubah menjadi mapan biasanya memiliki karakteristik birokratis. Karena itu, gerakan sosial secara gradual bisa berubah menjadi organisasi formal, sementara itu, sangat jarang suatu organisasi formal berubah menjadi suatu gerakan sosial. Sekedar contoh, sebelum menjadi partai politik (organisasi formal), PRD bisa disebut sebagai suatu gerakan sosial.

Kedua, meski tidak terlalu mudah, gerakan sosial juga perlu dibedakan dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) – yakni suatu asosiasi yang dibentuk untuk mempengaruhi para pembuat

kebijakan dalam cara yang menguntungkan para anggota-anggotanya. Asosiasi pengusaha tekstil adalah jelas-jelas kelompok kepentingan yang biasanya mempengaruhi para pembuat kebijakan sehingga kebijakan yang disusun lebih menguntungkan usahanya. Namun organisasi perempuan yang terlibat dalam kampanye kesetaraan jender, yang seringkali juga terlibat dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, agak susah dibedakan: apakah ia merupakan kelompok kepentingan atau merupakan bagian dari suatu gerakan sosial? Karena itu tidak ada batas yang benar-benar tegas antara gerakan sosial dan kelompok kepentingan.

Tidak seperti organisasi formal seperti partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan atau penekan yang lebih terorganisasi, gerakan sosial mungkin hanya diorganisasi secara informal, meski ia memiliki kaitan dengan partai politik dan juga kelompok-kelompok yang terlembagakan, dan bahkan suatu gerakan sosial bisa mengarah ke pembentukan partai politik (Jary & Jary, 1991: 588)

Tidak semua bentuk perlawanan politik yang bertebaran di berbagai belahan dunia bisa disebut sebagai gerakan sosial. Bagi Tarrow (1998: 4-7), konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar.

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Yang membedakan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif lain, seperti memberikan suara (voting), permainan sepakbola, dan lain-lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain, atau aturan-aturan kultural tertentu.

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem yang represif, tantangan kolektif disimbolisasi lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan mempertontonkannya melalui kata-kata, corak pakaian, dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif mereka.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan bersama (*common purpose*)

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan identitas kolektif

Sesuatu yang menggerakan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekadar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi

membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

### Asal Muasal GSB

Data sejarah menunjukkan adanya akumulasi yang terus bertambah tentang berbagai kisah perlawanan politik dan gerakan-gerakan penentangan terhadap pemegang kekuasaan yang dianggap otoriter dan represif di seluruh penjuru dunia ini. Para ahli ilmu sosial umumnya menempatkan fenomena Revolusi Perancis dan Konstitusi Polandia 3 Mei 1791 (*Polish Constitution of May 3, 1791*) pada abad ke-18 sebagai awal dari munculnya gerakan sosial di dunia. Sepanjang abad ke-19 kisah gerakan sosial diperkaya dengan gerakan buruh dan gerakan sosialis, yang pada gilirannya mengarah kepada pembentukan negara komunis, dan organisasi-organisasi dan partai-partai demokrasi sosial. Setelah Perang Dunia kedua gerakan sosial menampilkan ciri-ciri yang berbeda dengan periode sebelumnya yang utamanya ditandai oleh perubahan dan reformasi radikal.

Para ahli umumnya bersepakat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan dan perlawanan politik semakin bertambah dan kompleks. Ini antara lain tampak dari munculnya gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat (1955-1968), gerakan-gerakan perdamaian, lingkungan, dan feminism, serta perlawanan terhadap otoritarianisme baik di Eropa maupun di negara-negara berkembang telah membawa massa ke jalan-jalan untuk menuntut perubahan. Hal yang sama dilakukan oleh kaum ekstrimisme religius Islam dan Yahudi di negara-negara Timur Tengah, militanisme Hindu di India, fundamentalisme Kristen di Amerika Serikat, serta nasionalisme etnis di Balkan dan bekas Uni Sovyet. Yang mutakhir, sejak awal tahun 1990-an muncul gerakan sosial berskala global yang kemudian dikenal dengan gerakan anti-globalisasi (*anti-globalization movement*).

Gerakan-gerakan itu sering berhasil, tapi jika pun mereka gagal, aksi-aksi mereka telah mempengaruhi perubahan-perubahan di berbagai ranah kehidupan dan level tata sosial dan politik dari tingkat local hingga internasional.

Istilah gerakan sosial baru (GSB) dipergunakan secara luas untuk merujuk kepada fenomena gerakan sosial yang muncul sejak pertengahan 1960-an terutama di negara-negara maju, Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang telah memasuki era ekonomi pasca-industrial (*post-industrial economy*). Ini berarti bahwa wacana tentang GSB bermula di negara-negara maju sebagai bagian dari konteks perkembangan peradaban mereka.

Para ahli telah mengamati gejala sosial ini secara intens. Hasilnya adalah bahwa dalam komunitas ilmu sosial, GSB dipahami sebagai dua hal. Pertama, GSB dipahami sebagai suatu tipe gerakan sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru dan bahkan mungkin unik. Kedua, akumulasi pengetahuan yang dihasilkan dari riset tentang GSB telah membawanya kepada status sebagai suatu paradigma (cara pandang terhadap suatu subjek permasalahan) dalam memahami kenyataan sosial itu sendiri (Pichardo, 1997; Singh, 2001). Status sebagai paradigma ini telah memicu perdebatan intelektual yang bersemangat di kalangan para ahli ilmu sosial. Tulisan ini tidak hendak memasuki area perdebatan tersebut. Tulisan ini mendasarkan pijakan rujukannya kepada pemahaman yang pertama yang menempatkan GSB sebagai tipe (tambahan) gerakan sosial. Atau merujuk ke Pichardo (1997:425), GSB merupakan sekedar kisah tambahan yang muncul belakangan dalam episode yang disebut gerakan sosial (*the repertoire of social movements*).

### Karakter-karakter GSB

Pada dasarnya GSB muncul sebagai respon terhadap peralihan bentuk-bentuk gerakan sosial kontemporer di negara-negara Barat yang berkait dengan berkembangnya suatu dunia pasca-modern atau pasca-industrial (Pichardo, 1997: 411). Seiring dengan perubahan tata sosial dan peradaban Barat, para ahli melihat bahwa gerakan-gerakan sosial di sana memiliki tampilan watak yang berubah dari gerakan-gerakan sosial sebelumnya (gerakan sosial 'lama' atau klasik atau tradisional). Gerakan sosial tradisional biasanya dicirikan secara kuat oleh tujuan

ekonomis-material sebagaimana tercermin dari gerakan kaum buruh. Gerakan buruh pernah menjadi gerakan besar dan penting pada saat negara-negara Eropa (Barat) dan AS memasuki era industrial pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan buruh juga telah mendasari kelahiran partai (politik) buruh dan partai komunis.

Sementara GSB lebih berpusat pada tujuan-tujuan non-material. GSB biasanya menekankan pada perubahan-perubahan dalam gaya hidup dan kebudayaan daripada mendorong perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan publik atau perubahan ekonomi, sebagaimana tercermin dari gerakan lingkungan, anti-perang, perdamaian, feminism, dan sejenisnya (Nash, 2005; Wikipedia the free encyclopedia, tanpa tahun).

Dalam perkembangannya, para ahli telah memperluas kajiannya ke berbagai negara sedang berkembang, dan menemukan adanya tipe gerakan sosial yang kurang lebih sama, meskipun latar (*setting*) dan konteks perkembangan masyarakat pasca-industrial belum terjadi di negara-negara tersebut. Karena itu, GSB bukan hanya terjadi di negara-negara Barat saja, tetapi juga berlangsung di negara-negara berkembang (Singh, 2001). Gerakan-gerakan lingkungan, feminism, hak asasi manusia, perdamaian, dan sebagainya, yang biasa dirujuk sebagai bagian dari GSB, terus berlangsung baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Merujuk ke Pichardo (1997) dan Singh (2001), ciri menonjol GSB yang dianggap membedakannya dari gerakan sosial 'lama' atau tradisional, dapat diformulasikan sebagai berikut.

### *Ideologi dan Tujuan*

GSB menanggalkan orientasi ideologis yang kuat melekat pada gerakan sosial lama, sebagaimana sering terungkap dalam ungkapan-ungkapan 'anti-kapitalisme', 'revolusi kelas', dan 'perjuangan kelas'. Gerakan sosial baru tidak lagi tertarik dengan isu-isu seperti kenaikan upah buruh dalam industri, perjuangan terhadap ketimpangan ekonomi, dan eksplorasi kelas yang diakibatkan oleh bekerjanya sistem kapitalisme.

GSB menepis semua asumsi Marxian bahwa semua perjuangan dan pengelompokan didasarkan atas konsep kelas. Dengan penekanan

pada isu-isu spesifik yang non-materialistik, GSB tampil sebagai perjuangan lintas kelas. Singh (2001) menambahkan bahwa GSB pada dasarnya merupakan bentuk respon terhadap hadir dan menguatnya dua institusi yang menerobos masuk ke hampir semua relung kehidupan warga, yakni negara (*the state*) dan pasar (*the market*). Karena itu, GSB membangkitkan isu 'pertahanan diri' komunitas dan masyarakat untuk melawan ekspansi aparat negara dan pasar yang makin meningkat. Ekspresi terjelasnya mewujud dalam lahirnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial, kaum urban marginal, aktivis lingkungan, kelompok anti otoritarian, kaum anti rasisme, dan juga para feminis. GSB melawan tata sosial dan kondisi yang didominasi oleh negara dan pasar dan menyerukan sebuah kondisi yang lebih adil dan bermartabat.

### **Taktik dan Pengorganisasian**

GSB umumnya tidak lagi mengikuti model pengorganisasian serikat buruh industri dan model politik kepartaihan. GSB lebih memilih saluran di luar politik normal, menerapkan taktik yang mengganggu (*disruptive*), dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik. Para aktivis GSB juga cenderung mempergunakan bentuk-bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan matang sebelumnya, lengkap dengan kostum dan representasi simboliknya.

Dengan sedikit pengecualian Partai Hijau (*the green party*) di Jerman, GSB lebih memilih model politik akar rumput, memprakarsai gerakan-gerakan mikro pada kelompok-kelompok kecil, dan membidik isu-isu lokal dengan sebuah dasar institusi yang dibatasi. Mereka melahirkan berbagai asosiasi demokratis yang terorganisasikan yang terjalin dalam federasi atau aliansi longgar pada level nasional.

Merujuk Cohen (dalam Singh, 2001), GSB umumnya merespon dan membidik isu-isu yang bersumber dari civil society daripada perekonomian dan negara. Dalam hal sasaran perjuangan, menurut Cohen, GSB membatasi pada empat hal, yakni: tidak berjuang untuk kembalinya komunitas-komunitas utopia yang tidak terjangkau di masa lalu; berjuang untuk otonomi, pluralitas dan keberbedaan; melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran; dan

mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar. Karena itu, dalam pandangan Cohen, tujuan GSB adalah menata kembali hubungan negara, masyarakat dan perekonomian, dan untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis tentang otonomi dan kebebasan individual, kolektivitas, serta identitas dan orientasi mereka bisa didiskusikan dan selalu diperiksa.

### **Struktur**

GSB berupaya membangun struktur yang merefleksikan bentuk pemerintah representatif yang mereka inginkan. GSB mengorganisasi diri mereka dalam gaya yang mengalir dan tidak kaku untuk menghindari bahaya oligarkisasi. Mereka berupaya merotasi kepemimpinan, melakukan pemungutan suara untuk semua isu, dan memiliki organisasi ad hoc yang tidak permanen. Mereka juga mengembangkan format yang tidak birokratis sambil berargumen bahwa birokrasi modern telah membawa kepada kondisi dehumanisasi. Singkatnya, mereka menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif kepada kebutuhan-kebutuhan individu, yakni struktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan non-hirarkis.

### **Partisipan atau Aktor**

Partisipan GSB berasal dari berbagai basis sosial yang melintasi kategori-kategori sosial seperti gender, pendidikan, okupasi dan kelas. Mereka tidak terkotakkan pada penggolongan tertentu seperti kaum proletar, petani, dan buruh, sebagaimana aktor-aktor gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi. Para aktor GSB berjuang melintasi sekat-sekat sosialnya demi kepentingan kemanusian (Singh, 2001). Karena itu, aktor-aktor GSB juga berbeda dari gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marginal dan teralienasi.

Namun ada kesan yang kuat bahwa partisipan GSB umumnya berasal dari kalangan kelas menengah baru (*the new middle class*): sebuah strata sosial yang muncul belakangan yang bekerja di sektor-sektor ekonomi non-produktif (baca: bukan industri pabrikan). Mereka yang termasuk dalam kelompok ini umumnya tidak terikat oleh motif-motif keuntungan korporasi dan tidak bergantung pada dunia korporasi untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka umumnya

bekerja di sektor-sektor yang sangat bergantung pada belanja negara seperti kaum akademia, seniman, agen-agen pelayanan kemanusian, dan mereka umumnya merupakan kaum terdidik (Pichardo, 1997: 416-7).

Aktor-aktor GSB, sebagaimana dikemukakan oleh Claus Offe (1985, sebagaimana dikutip Singh, 2001), dicirikan secara jelas oleh penolakan mereka terhadap basis identifikasi diri yang mapan, yang dalam bahasa politik sering disebut sebagai 'kiri' atau 'kanan', 'liberal' atau 'konservatif'. Para aktor GSB juga tidak bisa dibedakan berdasarkan kelas, gender, suku, umur, lokalitas, dan seterusnya. Menurut Offe, aktor atau partisipan GSB berasal dari tiga sektor: kelas menengah baru, unsur-unsur kelas menengah lama (petani, pemilik toko, dan penghasil karya seni), dan orang-orang yang menempati posisi pinggiran yang tidak terlalu terlibat dalam pasar kerja, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para pensiunan.

Dengan ciri-ciri tersebut di atas, GSB menampakkan wajah gerakan sosial yang plural. Pluralitas itu terpantul jelas dari bentuk-bentuk aksi GSB yang menapaki banyak jalur, mencita-citakan beragam tujuan, dan menyuarakan aneka kepentingan. Medan atau area aksi-aksi GSB juga melintasi batas-batas region: dari aras lokal hingga internasional, sehingga mewujud menjadi gerakan transnasional. Karena itu pula strategi dan cara mobilisasi mereka pun bersifat global. Isu-isu yang menjadi kepedulian GSB melintasi sekat-sekat bangsa dan masyarakat, bahkan melintasi dunia manusia, menuju dunia alami. Dalam hal ini, GSB menampakkan wajah trans-manusia dengan mendukung kelestarian alam di mana manusia merupakan salah satu bagiannya. Ini secara jelas terpantul dari gerakan-gerakan anti nuklir, lingkungan atau ekologi, perdamaian, dan sebagainya, yang menghamparkan kebersamaan warga dari beragam nasionalitas, kebudayaan dan sistem politik (Singh, 2001).

Salah satu wajah atau tampilan GSB tersebut mungkin bisa ditemukan dalam kisah gerakan petani di Indonesia, yang merupakan bagian dari gerakan petani global yang berkembang sejak akhir dasawarsa 1990-an hingga sekarang. Bagian selanjutnya dari tulisan ini, memaparkan penggalan kisah gerakan petani di Indonesia dari level lokal hingga nasional.

## Repertoar Gerakan Petani

### **Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP)<sup>1</sup>**

Pada awalnya FP2NBP terdiri atas empat organisasi pada tahun 1998. Forum ini kini telah berkembang menjadi 'payung' dari 20 organisasi petani. FP2NBP menjadi bagian dari Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT). Selanjutnya SPJT menjadi anggota dari Forum Serikat Petani Indonesia (FPSI) di level nasional. FP2NBP telah 'memfasilitasi' perlawanan para petani dalam menghadapi penyewa tanah negara perkebunan dan kehutanan, baik perusahaan swasta maupun pemerintah yang umumnya memegang hak guna usaha (HGU) di Batang dan Pekalongan, Jawa Tengah. Gerakan petani tersebut di Batang membentang dari daerah sejuk di Pagilaran hingga ke pinggir pantai utara Brontok. Para pemegang HGU itu antara lain PT Pagilaran, PT Segayung, PT Simbangjati Bahagia, PTPN IX, PT Zanzibar, dan PT Perhutani.

Gerakan ini dimulai ketika Soeharto jatuh Mei 1998. Petani mulai melakukan gerakan merebut kembali tanah-tanah tersebut (*reclaiming*). Salah satu yang cukup besar adalah perebutan kembali tanah HGU yang dikelola PT Perkebunan Teh Pagilaran yang dimiliki Universitas Gadjah Mada.

Dalam kasus PT Perkebunan Teh Pagilaran, sedikitnya 3 petani harus menerima vonis bersalah dari pengadilan. Polisi menangkap sejumlah petani pada 11 Juli 2000 ketika para petani menduduki tanah PT Pagilaran itu. Warga berhamburan melarikan diri untuk mengungsi, di antaranya ke rumah Handoko Wibowo, pengacara yang mendampingi mereka. Sebanyak 21 orang ditahan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Batang. Mereka divonis bersalah antara 7 bulan hingga 18 bulan penjara.

Vonis pengadilan agaknya tak menyurutkan warga petani untuk menuntut hak atas tanah di areal PT Pagilaran tersebut. Terlebih lagi HGU PT Pagilaran ini akan habis tahun 2008 sehingga para warga yang bergabung dalam Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK) itu akan berjuang menuntut hak atas tanah itu.

---

<sup>1</sup> Bagian ini merujuk pada laporan Subur Tjahjono di harian *Kompas*, 2,3 dan 6 Februari 2006

Perlawanan petani juga terjadi di kawasan Brontok terhadap PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Siluwok/Subah (PTPN IX). Perlawanan terjadi karena para petani diancam 'diusir' dari lahan garapan mereka. Sejak tahun 1989, mereka menggarap areal tumpang sari di lokasi perkebunan tersebut, dengan system bagi hasil.

Merespon kemungkinan terusir dari lahan garapan tumpang sari mereka, para petani membentuk Paguyuban Petani Brontok Sejahtera (P2BS) dan bergabung dengan FP2NBP. Dengan organisasi P2BS ini mereka mendatangi DPRD Batang sekitar April 2005. Mereka diterima Komisi A DPRD Batang yang diketuai Zainuddin dari Fraksi PDL-P. DPRD lalu memfasilitasi pertemuan antara FP2NBP, Dinas Perkebunan, dan Badan Pertanahan Nasional Batang. Hasilnya cukup ampuh, mereka diperbolehkan menggarap tanah sampai keluarnya surat kedua, 24 Desember 2005.

Dalam suratnya tertanggal 24 Desember 2005, PTPN IX menyampaikan pemberitahuan izin penanaman areal tumpang sari kepada 141 keluarga petani penggarap yang antara lain menyebutkan, "... perusahaan mengizinkan kembali areal tumpang sari ditanami tanaman semusim seperti jagung, kedelai, atau kacang, dua musim tanam akan datang yang selesai sampai dengan akhir Juni 2006. Kemudian pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan dengan tidak memungut bagi hasil."

Ini berarti bahwa setelah Juni 2006, para petani penggarap tidak boleh lagi menggarap lahan yang diklaim milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX itu. Para petani tersebut menafsirkan surat itu sebagai "pengusiran" mereka dari lahan garapannya.

Gerakan petani di Batang ini terus berlangsung dengan menempuh sejumlah taktik seperti menduduki tanah, menggelar unjuk rasa dan bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan DPRD. Untuk memperjuangkan pemilikan tanah itu, berbagai unjuk rasa, baik di Semarang, Pekalongan, Batang, bahkan hingga Yogyakarta, telah digelar FP2NBP.

Selain karena kekecewaan tidak mendapatkan hak atas tanah, dan hadirnya struktur kesempatan politik sebagai akibat kejatuhan rezim Seoharto, gerakan petani di Batang juga menjadi tampak kuat karena adanya keterlibatan aktor dominan atau actor eksternal, seperti

pengacara independen Handoko Wibowo, Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Pekalongan.

Namun demikian, tidak semua gerakan petani tersebut mampu mencapai tujuan kolektif mereka. Hanya ada satu kasus di mana para petani akhirnya mendapatkan tujuan kolektif mereka berupa sertifikat, yakni kasus petani yang tergabung dengan Petani Kebumen dan Simbang (Kembang Tani) dengan PT Ambarawa Maju.

Bertolak dari latar kegagalan seperti ini, dengan dukungan pengacara Handoko Wibowo dan mahasiswa pendamping petani, FP2NBP yang beranggotakan sekitar 20.000 keluarga berupaya menyiapkan dan memformulasikan perubahan taktik gerakan mereka. Mereka telah bersepakat untuk melakukan perubahan cara/taktik perjuangan yakni dengan masuk ke dalam proses politik formal, yakni merebut jabatan politik di pemerintahan desa dan DPRD dengan memperkuat basis dan representasi. Karena itulah, di dalam pertemuan-pertemuan dan rapat kerja (Raker) yang mereka lakukan, FP2NBP mencari wakil-wakil mereka yang akan berjuang dalam pemilihan kepala desa tahun 2007, dan wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam kursi DPRD pada pemilu 2009. Mereka berasumsi bahwa dengan adanya wakil-wakil mereka di pemerintahan desa dan DPRD, perjuangan untuk mendapatkan klaim hak-hak atas tanah akan lebih mudah tercapai. Jabatan kepala desa penting karena dia yang menandatangani persetujuan atas perpanjangan atau pemutusan hak guna usaha (HGU). DPRD penting karena pengaruh politiknya terhadap kebijakan Bupati Batang

Handoko yang mendampingi petani Batang sejak 1998 itu yakin dapat mengegoarkan calon kepala desa untuk lima desa di Kecamatan Bandar. Beberapa calon sudah disiapkan, minimal berpendidikan sekolah menengah pertama, seperti Daryono untuk pilkades Sembojo, Bandar.

Taktik ini ditempuh, menurut Handoko, karena lembaga-lembaga politik formal dirasakan tidak benar-benar membantu memperjuangkan tuntutan mereka. Handoko mengatakan "Kami baru sadar ternyata kami selama ini dibuat mainan saja".

Hingga kini (April 2006), masih sulit untuk memperkirakan peluang keberhasilan dari taktik gerakan petani di Batang ini. Handoko

sudah mengidentifikasi bahwa UU bidang politik yang melarang munculnya calon independent dan pembentukan parpol local mungkin akan menghambat realisasi taktik ini. Jika hambatan ini terjadi, maka menurut Handoko "Kami akan mengudeta partai gurem. Atau dengan sangat terpaksa, saya yakin kami akan dilamar partai politik". Ini adalah sebuah taktik 'eksperimen' gerakan yang mungkin tampak mustahil, tetapi sedang diupayakan bisa berjalan di Batang.

### **Serikat Petani Pasundan (SPP)<sup>2</sup>**

Meskipun dideklarasikan pada tanggal 24 Januari 2000 di Garut, SPP memiliki proses pembentukan serikat ini sebenarnya telah dimulai sejak 1980-an. Pada dekade tersebut, gerakan protes petani tengah marak dalam menentang penguasaan tanah yang dilakukan perusahaan Perkebunan dan Perhutani. Di mata petani penguasaan (HGU) oleh perusahaan tersebut dianggap merampas hak mereka atas tanah. Gerakan protes petani didukung oleh kelompok-kelompok aktivis mahasiswa dan ormas pemuda (Islam) di Garut yang tergabung dalam Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Islam Garut (FPPMIG), yang kemudian berganti nama menjadi Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Garut (FPPMG) pada tahun 1989. Forum ini bersama dengan para aktivis dari kota lain utamanya Bandung yang tergabung dalam berbagai komite Solidaritas Mahasiswa untuk kasus-kasus tanah, bersinergi dan bergabung dalam wadah Komite Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (KPMURI). Komite ini secara aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap petani di wilayah Jawa Barat.

Seturut dengan proses pendampingan tersebut, kalangan aktivis di Garut menggulirkan ide tentang pembentukan serikat petani di lingkungan wilayah Pasundan atau Jawa Barat bagian selatan. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kondisi politik yang represif pada saat itu, mereka memutuskan untuk bergabung dengan wadah yang lebih luas, yakni Serikat Petani Jawa Barat (SPJB) yang telah dibentuk pada tahun 1991.

---

<sup>2</sup> Bagian merupakan review dari buku Nurul Faizah, *SPP, Advokasi Petani dengan Berdikari*, Jakarta: PIRAC, 2004, dan dilengkapi bahan-bahan dari berita media massa.

Pada tanggal 17 Agustus 1999, pada aktivis FPPMG mendirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat (Yapemas) di Garut sebagai 'tameng legal' untuk perjuangan mereka. Ini dilakukan karena pada aktivis FPPMG, selain melakukan pendampingan dan pengorganisasian petani, mulai memperluas aktivitas mereka dengan merintis upaya pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Seturut dengan dinamika aksi yang berjalan makin aktif di wilayah Garut, Tasik dan Ciamis, pembentukan organisasi petani tersendiri menjadi kebutuhan yang mendesak. Perlawanan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria di tangan para pemegang HGU, dirasa tidak efektif tanpa adanya wadah organisasi/serikat. Apalagi pada saat yang hampir bersamaan, SPJB sebagai organisasi payung mengalami krisis kepemimpinan dan manajerial. Berlatar kondisi tersebut, para petani bersama aktivis pemuda dan mahasiswa (FPPMG) mendeklarasikan Serikat Petani Pasundan (SPP) pada tanggal 24 Januari 2000. SPP menjadi wadah dan sarana perjuangan petani dalam menuntut hak atas tanah dan reformasi agraria di tiga kabupaten, yakni Garut, Tasik, dan Ciamis.

Anggota SPP terdiri dari organisasi tani lokal (OTL) yang memiliki kewenangan secara otonom dalam menentukan program, kepemimpinan dan mengelola anggaran. Setiap OTL dipimpin oleh seorang koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dengan para ketua kelompok tani yang menjadi anggota OTL.

Tidak tersedia data yang pasti di Sekretariat SPP mengenai jumlah OTL yang telah bergabung dalam SPP dan lokasi OTL itu berada. Ini terjadi karena kerap terjadi perubahan jumlah OTL dan kelompok tani sebagai akibat dari penambahan anggota dan pemekaran atau penggabungan kelompok-kelompok tani.

Struktur organisasi SPP disusun dengan mengacu kepada kepentingan OTL sebagai anggotanya. Kewenangan tertinggi dipegang oleh Kongres Dewan Pimpinan OTL yang bertugas mengukuhkan Anggaran Dasar dan garis besar program, mengontrol asset kepemilikan organisasi, dan mengangkat Sekretaris Jenderal (sekjen). Sekjen yang memimpin kesekretariatan SPP, dibantu oleh para pengurus, bertugas menjalankan keputusan yang dihasilkan oleh kongres Dewan Pimpinan OTL. Sekretariat SPP dan Dewan Pimpinan OTL bertemu setiap tiga bulan sekali untuk pertanggungjawaban dan perencanaan serta evaluasi kegiatan.

Sekretariat SPP dijalankan oleh Sekjen dan para pengurus yang berasal bukan dari kalangan petani, tetapi berasal dari aktivis 'kelas menengah' atau 'pendamping'. Ini didasarkan pada petimbangan bahwa SPP saat ini masih berfokus pada penguatan OTL, sehingga jika ada tokoh petani yang menjadi pengurus secretariat dikhawatirkan akan 'mencabut mereka dari akarnya'. Namun, secara bertahap para aktivis dari kalangan petani akan dilibatkan di secretariat terutama dari kalangan pemuda atau anak-anak petani yang telah menguasai dasar-dasar gerakan petani.

Sedangkan di tingkat kabupaten dipilih seorang koordinator kabupaten yang bertugas mengkoordinasi OTL-OTL yang ada di kabupaten, dan sekaligus berkoordinasi dengan organisasi pendamping dan sekretariat SPP. Di level kabupaten, OTL-OTL bertemu setiap satu bulan sekali untuk pertanggungjawaban dan perencanaan kegiatan.

Mekanisme organisasi SPP diatur melalui kesepakatan-kesepakatan tertulis dan tidak tertulis. Hingga tiga tahun usia SPP, serikat ini belum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini sengaja dilakukan karena serikat sedang tumbuh dan membangun 'roh' dan budaya organisasi sehingga keberadaan AD/ART dikhawatirkan bisa menggiring organisasi menjadi terlalu birokratis.

Agenda aksi lapangan biasanya disusun sendiri oleh setiap OTL, yang dikoordinasikan dengan koordinator SPP kabupaten dan organisasi pendamping di masing-masing kabupaten. Kebutuhan yang berkaitan dengan agenda kerja lapangan yang tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten disampaikan ke sekretariat SPP dan diagendakan menjadi agenda kerja atau kegiatan sekretariat. Sebaliknya, sekretariat juga tidak bisa merumuskan agenda aksinya sendiri. Dalam merencanakan aksi atau demonstrasi, misalnya, secretariat harus membicarakannya dengan para pemimpin OTL karena hal ini berkaitan dengan kesiapan OTL untuk mobilisasi anggota dan pendanaannya.

Sebagaimana telah disinggung sekilas, sejak awal pendiriannya, SPP mempunyai organisasi-organisasi pendamping atau pendukung yang ada di setiap level. Empat organisasi memainkan peran sebagai organisasi pendamping atau pendukung. Yapemas menjadi organ

pendamping untuk sekretariat SPP. Tiga organisasi lainnya yang dijalankan oleh para pemuda dan mahasiswa mendampingi OTL-OTL di tingkat kabupaten, FPPMG di Garut, FPMR di Tasikmalaya, dan FARMACI di Ciamis.

Fungsi utama dari organisasi pendamping SPP adalah sebagai transformator penyadaran rakyat untuk berjuang dan berorganisasi. Selain itu, organisasi pendamping juga menjadi 'kurir' atau penyampai informasi dari dan ke semua unit organisasi. Organisasi pendamping yang berasal dari forum mahasiswa biasanya lebih memiliki fungsi sebagai pasokan atau penyampai informasi, rekrutmen kader, dan sekaligus sebagai arena belajar bagi pemuda dan mahasiswa tentang gerakan dan organisasi SPP.

Khusus untuk Yapemas, organisasi ini menjalankan peran-peran tertentu yang 'belum mungkin' dijalankan sendiri oleh petani, utamanya berkaitan dengan aktivitas dokumentasi dan pembukaan akses. Dalam kaitan dengan dokumentasi, Yapemas menyusun data base tentang kasus-kasus keterlibatan SPP dalam aksi melawan pihak perkebunan dan kehutanan, yang memberikan gambaran tentang jumlah OTL yang bergabung dalam SPP (yang tidak dimiliki oleh sekretariat SPP). Yapemas melakukan pendampingan petani (OTL) di 22 wilayah kasus (yang meliputi 17 kecamatan dan 30 desa) di kabupaten Garut, 3 wilayah kasus di kabupaten Tasikmalaya, dan 27 wilayah kasus di kabupaten Ciamis. Dengan demikian, Yapemas melakukan pendampingan petani di 52 wilayah kasus dengan perkiraan jumlah OTL mencapai 100-an lebih dan dengan jumlah petani sekitar 400.000 orang.

Dalam hal akses, Yapemas berperan sebagai penghubung diantara organ-organ pendukung SPP dan pihak-pihak lain dalam kaitan dengan kerjasama program. Lebih dari itu, Yapemas juga menjadi 'pintu legal' bagi aktivitas yang belum mungkin dilakukan SPP karena sifat dan bentuknya yang 'ada karena legitimasi rakyat' saja. Misalnya, Yapemas membantu SPP dalam melakukan desakan atau upaya mempengaruhi pihak-pihak lain seperti Pemda dan DPRD dalam kaitan dengan kebijakan-kebijakan di daerah.

Singkatnya, program Yapemas dikaitkan dan dirumuskan dengan kebutuhan SPP. Yapemas tidak membuat program di luar

kebutuhan SPP; apa yang dirumuskan Yapemas berangkat dari kebutuhan SPP.

Fokus kerja SPP mencakup sejumlah kegiatan, antara lain: advokasi tanah (*reclaiming* atas lahan-lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan dan perhutani), pengembangan usaha ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan penggalian dana swadaya bagi organisasi lokal, pelatihan kepemimpinan organisasi tani lokal (OTL), dan rekonstruksi perdesaan menuju otonomi desa.

Dalam kaitan dengan isu tanah, SPP kini berfokus pada upaya mempengaruhi kebijakan tentang, dan mempertahankan pemeliharaan tanah yang sudah dapat direbut (*reclaimed*) dengan mengupayakan perolehan legalitas atas tanah tersebut. Selain itu, SPP juga melakukan berbagai aksi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap bisa melanggar hak-hak mereka atas tanah. Bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, SPP menentang RUU Perkebunan karena memberikan basis legal untuk hak guna usaha (HGU) kepada pengusaha perkebunan swasta nasional, BUMN dan asing, yang dinilai akan membuka ruang bagi pelestarian eksplorasi dan ketergantungan petani terhadap pengusaha perkebunan (*Tempo Interaktif*, 8 Juni 2004). SPP terlibat aktif dalam protes terhadap Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan Perpres ini, pemerintah dapat mencabut hak rakyat atas tanah dan dinilai melanggar HAM (*Pikiran Rakyat*, 30 Juni 2005; berita Walhi online, 30 Juni 2005).

Dalam kaitan dengan rekonstruksi desa, SPP melakukan pendidikan untuk para anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) yang berasal dari SPP, seperti pelatihan kepemimpinan, membuat peraturan desa (perdes), dan sejenisnya yang berupaya mendorong perwujudan otonomi desa. Hampir di semua wilayah kerja SPP, para anggota SPP menempati posisi-posisi strategis di BPD, bahkan sejumlah kadernya mampu menduduki jabatan kepala desa.

Sumber dana yang dipergunakan untuk mendukung aksi-aksinya diperoleh secara swadaya oleh SPP. Karena SPP beranggotakan OTL-OTL, maka masing-masing OTL mendanai kegiatannya sendiri. Penggalangan dana secara swadaya dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan petani dan sekaligus membangun keswadayaan organisasi. Ini dilakukan melalui sejumlah cara, antara lain iuran anggota, penanaman lahan kolektif, keuntungan usaha koperasi, upah kerja borongan dan dana dadakan untuk program.

Menghadapi dua rezim politik yang berbeda (rezim Orba dan pasca Orba), SPP mengembangkan strategi gerakan yang berlainan. Strategi gerakan yang dikembangkan SPP dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan berikut. Tahapan pertama (pada) jaman (rezim) Soeharto, SPP menganggap pemerintah adalah sumber bencana dan kesadaran yang ada adalah kesadaran tidak percaya kepada pemerintah. Kesadaran bahwa pemerintah adalah hal yang menindas dan merugikan rakyat. Maka kemampuannya adalah kemampuan mengkritisi dan kemampuan bertahan. Mengkritisi atas segala tindakan, ucapan, program pemerintah serta mempertahankan diri dari tindakan pemerintah. Bentuknya bagaimana rakyat bisa bersatu, bersolidaritas, tidak berhubungan secara fisik dengan pemerintah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah.

Tahapan kedua adalah bagaimana merekrut orang-orang yang bisa menaklukkan pemerintah, simbol sosial, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bersembunyi di balik itu dan masuk ke dalam (berbagai) organisasi formal, misalnya mendirikan (baca: terlibat di) berbagai ormas-ormas pemuda yang ada saat ini. Sedangkan di desa, bagaimana dapat masuk ke koperasi atau KUD-KUD. Jadi masuk ke dalam koridor-koridor yang disediakan oleh pemerintah (sebagai) proses mempengaruhi dari dalam.

Tahapan ketiga adalah perebutan, yang dilakukan dengan merebut posisi-posisi strategis di desa. Ketika mendengar otonomi daerah, jauh-jauh hari sudah disiapkan peran di BPD. Desanya dikontrol untuk tunduk kepada BPD. BPD ini merupakan sub organisasi yang melakukan pemerintahan tandingan di tingkat desa. Keputusan-keputusan itu dibuat oleh SPP sehingga dapat menguasai kebijakan di dalam mengontrol. Penguasaan lahan lebih pada pertahanan kalau sekarang periode penguasaan lahan sudah dianggap selesai bagi yang lama. Bagi yang baru masih melakukan ekspansi (upaya *reclaiming*). Bagi SPP, saat ini pemerintah lebih ditempatkan sebagai rival (Nurul Faizah, 2004; 24-25).

### Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU)<sup>3</sup>

SPSU terlahir sebagai produk dari pergulatan aksi yang dilakukan oleh Yayasan Sintesa sejak pertengahan tahun 1980-an. Yayasan Sintesa bermula dari aktivisme kelompok studi mahasiswa USU Medan yang bernama 'Sintesa Forum Study', yang aktif sejak 1985. Setelah merasa jenuh dengan aktivitas kelompok studi dan mereka merasakan adanya keperluan untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan masyarakat, dan itulah yang mendorong mereka untuk mendirikan Ornop/LSM Yayasan Sintesa pada tahun 1987. Yayasan ini memilih dan berfokus pada kegiatan teknologi tepat guna (TTG) sebagai 'entry point' aksi pengembangan masyarakat. Mereka terinspirasi oleh pemikiran J.F. Schumacher, 'Kecil itu Indah'. Yayasan ini memulai kiprahnya dengan memperkenalkan 'Listrik Masuk Desa', dengan membangun pembangkit listrik tenaga air kecil (*micro hydro*) di desa Loburapa, kecamatan Bandar Pulau, kabupaten Asahan. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan politis sebagai 'alternatif' terhadap PLTA Asahan yang tidak memberi manfaat pengadaan listrik kepada masyarakat setempat.

Dalam mengembangkan teknologi pembangkit listrik ini, Sintesa menerapkan metodologi dan teknik PAR (*Participatory Action Research*). Masyarakat setempat terlibat dari mulai tahap identifikasi masalah dan potensi, perumusan konsep, perancangan teknis, sampai ke pelaksanaan dan penyelesaian akhir proyek. Dibentuk pula kelompok-kelompok kerja yang menjadi kontak utama Sintesa sekaligus menjadi cikal bakal basis pengorganisasi petani setempat pada masa-masa berikutnya nanti.

Program Sintesa mulai meluas ke desa-desa lain di kecamatan Bandar Pulau sejak awal 1990-an. Seturut dengan perkembangan tersebut, semakin banyak petani yang bergabung dalam kelompok-kelompok tani dampingan Sintesa. Sejak saat itu, disamping terus mengembangkan TTG, Sintesa mulai fokus pada masalah penguatan petani. Sintesa kemudian mengembangkan program kesejahteraan petani melalui aktivitas pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) dan ekonomi kerakyatan. Pada saat itu muncul persoalan 'pencaplokhan'

<sup>3</sup> Bagian ini disunting dari buku Roem Topatimasang et.al, *Merubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: REaD Books, 2000, hal 153-158.

lahan petani oleh program pembangunan pemerintah dan perusahaan perkebunan. Hal ini membawa Sintesa untuk terlibat dalam advokasi persoalan tanah petani dan dalam berbagai advokasi nasional seperti Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan program Pengembangan Organisasi Tani Strategis (POTS). Pada titik waktu inilah SPSU dibentuk sebagai wadah gerakan petani sekaligus wadah perjuangan politik, ekonomi dan budaya petani. SPSU terdiri dari kelompok-kelompok dampingan Yayasan Sintesa yang tersebar di kabupaten Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Anggota SPSU pun terus bertambah. Pada Kongres pertama SPSU November 1997 di Loburapa hadir tidak kurang dari 600 orang utusan petani.

Aktivitas Sintesa dan SPSU pun untuk selanjutnya berjalan seiring dan saling mendukung. Sintesa mengembangkan teknologi pertanian organik dengan pendekatan pengendalian hama terpadu (*integrated pest management*). Ini dilakukan dengan mengembangkan 'stasion lapangan' di desa Loburapa. Manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat mendorong mereka untuk menjual sebagian lahan mereka kepada Sintesa, sehingga 'stasion' tersebut berkembang menjadi suatu pusat pertanian organik terpadu, mulai dari lahan basah untuk tanaman pangan dan jangka pendek sampai lahan kering untuk tanaman perdagangan jangka panjang. Dalam perkembangannya, 'stasion lapangan' yang mencapai luas 25 hektar tersebut tidak hanya menjadi lahan uji coba saja, tetapi menjadi lahan produktif yang mampu memberikan pemasukan dana dan menjadi basis keuangan dan pendanaan swadaya bagi Sintesa dan SPSU.

SPSU pun muncul sebagai organisasi petani yang kuat dan berpengaruh di Sumatera Utara. Penyebaran anggotanya kini meluas ke kabupaten-kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Simalungun, dengan jumlah keseluruhan sekitar 32.000 orang anggota aktif, selain ribuan pendukung dan simpatisan. SPSU bahkan menjadi acuan atau contoh model serikat-serikat petani yang muncul kemudian di propinsi-propinsi lain di Sumatera. Boleh dikatakan bahwa dalam kenyataannya, SPSU telah memicu kelahiran serikat-serikat petani di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung. Bersama-sama dengan serikat-serikat petani di Jawa dan Bali, SPSU menjadi salah satu perintis utama berdirinya Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada tahun 1998. SPSU juga bergabung sebagai anggota Federasi

Petani Sedunia (*La Via Campesina*) yang berpusat di Honduras. *La Via Campesina* sendiri dikenal sangat kritis dan menentang tata perdagangan bebas dunia yang disponsori oleh WTO.

Strategi gerakan yang dikembangkan oleh SPSU diarahkan untuk memperkuat gerakan petani di tingkat akar rumput dengan mendirikan dan mengaktifkan organisasi tani local (OTL) dan juga organisasi tani perempuan local (OTPL) sebagai basis anggota SPSU. Dengan cara ini, maka petani benar-benar menjadi akar dan fondasi gerakan petani.

Selain itu, untuk memperkuat strategi gerakan dan pencapaian tujuan kolektif, selanjutnya dibentuk organisasi-organisasi pendukung, selain Sintesa, yang masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang berbeda tapi saling mendukung.

1. Yayasan Sintesa sendiri yang berkedudukan di Kisaran, dengan fungsi khusus sebagai pusat pendidikan dan pelatihan anggota SPSU, selain bertanggung jawab mengembangkan metodologi pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) untuk semua aktivis inti SPSU dan jaringan organisasi pendukungnya.
2. Yayasan Alam Tani yang berkedudukan di Loburapa sebagai pusat produksi yang mengelola lahan 25 hektar di sana sekaligus mengelola kampus pusat pelatihan.
3. Yayasan Kesejahteraan Tani (YASENI) yang berkedudukan di Medan dengan fungsi khusus sebagai pengelola utama program pengembangan ekonomi dan lembaga keuangan petani anggota SPSU pada tingkat local (koperasi kredit, koperasi produksi dan konsumsi, dll).
4. Yayasan Berkat Tani yang berkedudukan di Padang Sidempuan sebagai pusat pengorganisasian untuk wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Yayasan Labuhan Tani (YALTA), berkedudukan di Rantau Parapat, sebagai pusat pengorganisasian untuk wilayah kabupaten Labuhan Batu, sekaligus mengembangkan pola pertanian organic daerah aliran sungai (ada 68 sungai besar dan kecil di kawasan tersebut) serta penanggulangan bencana alam (karena 68 sungai yang ada setiap tahun meluap dan merusak sawah para petani setempat).
6. Yayasan Amanat Tani Indonesia, berkedudukan di Medan, dengan fungsi khusus mengembangkan lembaga-lembaga

- keuangan dan usaha perdagangan pada tingkat yang lebih tinggi untuk menunjang usaha-usaha sejenis pada tingkat local oleh YASENI).
7. Green Net Indonesia, berkedudukan di Medan, dengan fungsi khusus mengembangkan saluran dan jaringan pemasaran (*outlet chains*) hasil-hasil produksi pertanian organik anggota SPSU.
  8. Lembaga Komunikasi Rakyat 'Delapan', berkedudukan di Medan, dengan fungsi khusus sebagai pusat produksi media komunikasi dan informasi dalam mendukung seluruh kegiatan advokasi (kampanye, lobi, aksi massa, dll) oleh SPSU, selain menyediakan media pelatihan dan pendidikan anggota SPSU ke organisasi pendukung lainnya.

Delapan lembaga ini selanjutnya membentuk Konsorsium Pendukung Organisasi Tani (KONPORT) yang bertugas mendukung pengembangan SPSU untuk menjadi organisasi tani yang kuat. Pola hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut dan antara KONPORT dengan SPSU diatur melalui aturan sebagai berikut.:

- a. Setiap anggota KONPORT boleh menggali sumber-sumber dana sendiri setelah berkonsultasi dengan SPSU (sesuai aturan yang ada di SPSU).
- b. Pengikat KONPORT adalah komitmen untuk mendukung SPSU.
- c. Jika salah satu anggota KONPORT memerlukan dukungan financial dan dukungan program sesama anggota, maka yang lain wajib berkonsultasi dalam hal pengajuan program dan anggarannya di antara mereka sendiri.
- d. Setiap anggota KONPORT wajib memberikan dukungan kepada SPSU dalam bentuk dukungan dan dana berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan SPSU dan sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga yang bersangkutan.
- e. Setiap anggota KONPORT adalah wajib menghadiri pelaksanaan dan mematuhi hasil rapat koordinasi yang dilakukan SPSU.
- f. Jika terjadi pembubaran salah satu anggota KONPORT, maka harta organisasi tersebut dihibahkan ke SPSU.

Dengan model pengorganisasian yang demikian, SPSU tampil sebagai organisasi gerakan petani yang memiliki basis keanggotaan di

akar rumput yang mengakar dan sekaligus mempunyai organ-organ pendukung yang saling menopang. SPSU pun semakin kuat dan berani dalam memasuki gelanggang politik, terlibat dalam berbagai aksi advokasi seperti kampanye, aksi massa dan lobi untuk memperjuangkan hak petani atas tanah, serta berjuang merebut kembali tanah-tanah petani yang diambil oleh perusahaan dan perkebunan besar.

Sebagai contoh, SPSU melakukan aksi demonstrasi yang diikuti oleh 700-an petani dari kabupaten Asahan, Simalungun dan Langkat di gedung DPRD Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2005. Sembari melakukan aksi jalan kaki dan orasi, mereka menuntut penyelesaian sengketa tanah antara petani dan pihak perkebunan besar yang tidak kunjung usai dan acap kali menjadikan para petani sebagai korban. Salah satu kasus sengketa tanah tersebut adalah lahan seluas 1.200 hektar di Bandar Buluh yang diambil alih oleh PT Raja Garuda Mas sejak awal 1970-an.

Ketua SPSU menyatakan bahwa berlarut-larutnya sengketa tanah telah menyebabkan sejumlah petani menjalani hukuman pidana karena memperjuangkan klaim haknya atas tanah. Misalnya, lima orang petani dari Asahan harus menjalani proses pengadilan dengan dakwaan merusak perkebunan Bakrie Sumatera Plantations (BSP). Sejumlah petani juga diteror karena memperjuangkan tanah mereka yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara II di kabupaten Langkat. Tidak berlebihan bahwa di mata para petani, pemerintah secara terus menerus mengabaikan hak-hak petani atas tanah, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menyelesaikan persengketaan tersebut secara cepat (Kompas, 23 September 2005).

### *Jejaring Nasional untuk Formulasi Hak-hak Asasi Petani*

Ketiga serikat petani yang dipaparkan di atas hanyalah sedikit dari begitu banyak serikat-serikat petani yang telah dibentuk di berbagai daerah di nusantara. Hampir di setiap kabupaten dan propinsi ditemukan serikat-serikat petani dengan aneka ragam penamaan. Sebagaimana telah sedikit dikemukakan sebelumnya, FSPI dibentuk pada tanggal 8 Juli 1998 di desa Loburapa kabupaten Asahan Sumatera Utara, sebagai organisasi 'payung' yang menaungi serikat-serikat petani dari berbagai daerah. Pendirian FSPI merupakan bagian dari

perjuangan panjang para petani untuk mendapatkan kebebasan dalam bersuara dan berserikat dalam memperjuangkan hak-haknya yang ditindas pada masa Orde Baru. Secara periodik, FSPI menggelar konggres nasional, yang diawali pertama kali pada tahun 1999 di Medan.

Hingga tahun 2005, FSPI beranggotakan, antara lain: Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (Permata), SPSU, Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Persatuan Petani Jambi (Pertajam), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), Serikat Petani Lampung (SPL), Serikat Petani Banten (SPB), SPP, Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT), Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (Serta NTB), Serikat Petani Kabupaten Sikka-NTT (SPKS-NTT).

Di tingkat internasional, FSPI menjadi anggota dari *La Via Campesina*, sebuah organisasi pergerakan petani dunia yang berpusat di Honduras. FSPI terpilih sebagai koordinator wilayah untuk Asia Tenggara dan Asia Timur pada Kongres ke-3 *La Via Campesina* di India. Selanjutnya pada Kongres ke-4 pada tahun 2004 di Sao Paolo Brasil, FSPI dipilih sebagai International Operative Secretariat *La Via Campesina* untuk periode 2004-2008.

Fokus perjuangan federasi ini adalah memperjuangkan hak-hak petani, pembaruan agrarian, kedaulatan pangan, perdagangan yang adil, keadilan jender dalam bidang pertanian, penguatan organisasi tani, dan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Sejumlah isu sentral yang menjadi arah perjuangan tersebut sebenarnya bermuara perjuangan melawan dominasi ideologi dan praktek kebijakan neoliberalis, khususnya dalam bidang pertanian yang telah menyebabkan pengabaian secara serius hak-hak petani.<sup>4</sup>

Serikat-serikat petani yang tergabung dalam FSPI, bersama dengan kalangan akademis-aktivis, Ornop/LSM pendamping petani, dan lembaga penelitian, antara lain Desa, IPPHT, Insist/REaD, Mitra Tani, Sikep, SPTN HPS, Jarnop-PO, Lesman, Simpul Kehati Jawa-Bali, PAN-Indonesia, Gita Pertiwi, Konsorsium Masyarakat Fair Trade, KPPA, KEHATI, Pusat PHT-IPB, FAO, KPA, KPI, Sedeso, Yapsel, Elsam, Sintesa, Jarnop-PP, FPPM, P3R, IPB, Koalisi Perempuan Indonesia,

<sup>4</sup> Lebih detil tentang FSPI, lihat situs [www.fspi.or.id](http://www.fspi.or.id)

Nastari, Konphalindo, dan Cindelaras, sejak 15 November 1998 sampai 28 Februari 2001 (dua tahun) telah melakukan serangkaian aktivitas dan gerakan untuk merumuskan hak-hak petani. Perumusan hak-hak petani yang dilakukan secara 'bottom-up' dan partisipatif itu dikoordinasikan oleh Cindelaras, sebuah Ornop berkedudukan di Yogyakarta yang aktif terlibat dalam upaya pemberdayaan desa dan kajian-kajian global.

Hasil perumusan hak-hak petani tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen 'Hak-hak Asasi Petani' yang dideklarasikan pada tanggal 20 April 2001 pada Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria sebagai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Petani di Cibubur, Bogor oleh kurang lebih 110 aktivis petani dan 40 Ornop/LSM pendamping petani dari berbagai wilayah nusantara. Menurut Francis Wahono (2005: xii), sebagai rumusan *bottom-up* dari petani, teks Hak-hak Asasi Petani yang telah dideklarasikan itu memang sudah final. Namun sebagai rumusan baku yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara *academic discernment* (wiweka-akademik) atau penalaran akademik bertumpu pengalaman serta legislatif, belumlah berakhir.

Dokumen itu memuat dua bagian besar: mukadimah dan 67 butir hak-hak asasi petani. Pada bagian mukadimah termuat gugus uraian tentang siapakah petani, alasan menyatakan dan menuntut hak-haknya, siapakah yang dituntut melaksanakan kewajibannya atau pemangku kewajiban, dan agenda bersam. Sedangkan butir-butir hak-hak asasi petani terbagi ke dalam 8 bab dengan 67 butir, yang mencakup: hak-hak asasi petani atas hidup, hak penguasaan dan pemakaian sumberdaya alam dan kemampuan pribadinya, hak petani atas produksi, hak petani atas konsumsi, hak-hak petani akan pemasaran produk dan pengadaan asupan, jaminan mutu dan hak kekayaan intelektual akan produknya, hak akan keberorganisasian, hak akan reproduksi, dan hak petani akan ekspresi.<sup>5</sup>

---

5. Lebih detil tentang proses dan hasil rumusan hak-hak asasi petani, lihat buku Francis Wahono (ed.), *Hak-hak Asasi Petani dan Proses Perumusannya*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005.

## Catatan-catatan Penyimpulan

Gerakan petani yang dipaparkan di atas hanyalah penggalan dari kisah gerakan petani yang lebih luas di Indonesia. Lebih dari itu, paparan tersebut juga hanya merupakan bagian kecil dari kisah gerakan sosial petani yang jauh lebih besar yang sedang terus dijalankan oleh para petani di seluruh pelosok dunia (Borras Jr, 2004; Noer Fauzi, 2005). Meskipun demikian, dari penggalan kisah gerakan petani di Indonesia tersebut, dan dengan merujuk ke konsep gerakan sosial dan karakteristik GSB, sejumlah catatan penyimpul yang bersifat hipotetis bisa ditarik sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut.

Pertama, dari sisi historis, meskipun gerakan petani memiliki jejak sejarah yang panjang di bumi nusantara, perubahan politik yang mengiringi pergantian rezim Orde Baru ke rezim pasca Orde Baru menyediakan kesempatan dan ruang politik yang luas untuk menginisiasi, mengorganisasi dan memperkuat gerakan-gerakan perjuangan petani. Ini berarti bahwa iklim politik demokratis yang berlaku semenjak kejatuhan rezim Orde Baru, benar-benar dimanfaatkan oleh para aktor gerakan petani untuk merumuskan dan menuntut hak-hak dan tujuan kolektif mereka. Karena itu, bukanlah suatu kebetulan semata jika gerakan-gerakan petani muncul dan berkembang di berbagai pelosok negeri, yang diikuti dengan pengembangan jejaring gerakan petani dari tingkat lokal hingga nasional.

Kedua, gerakan petani, setidaknya dari kisah di tiga daerah tersebut, muncul sebagai bentuk respon terlembaga terhadap kondisi kekerasan struktural yang mendera mereka sejak masa Orde Baru. Kekerasan struktural secara jelas ditunjukan oleh beroperasinya perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mengokupasi dan menguasai tanah-tanah public/negara melalui HGU, yang pada gilirannya menyebabkan akses penguasaan terhadap tanah-tanah tersebut oleh petani makin terbatas bahkan tertutup. Manifestasi yang acapkali tampak adalah sengketa tanah antara komunitas-komunitas petani dan perusahaan perkebunan dan kehutanan milik negara dan swasta. Ketiadaan kepastian tentang penyelesaian masalah sengketa tanah ini sebagai akibat dari proses hukum dan peradilan yang rumit, telah menjadi salah satu sumber pendorong penting bagi munculnya kebutuhan pengorganisasian petani sebagai sarana mencapai tujuan kolektif petani. Sampai tingkat tertentu, berkat pengorganisasian ini,

para petani berhasil mendapatkan kembali hak-hak atas tanah melalui jalan pendudukan (reclaiming), yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Ketiga, dalam kaitan dengan pengorganisasian atau penguatan basis gerakan, LSM/Ornop dan tokoh-tokoh lokal turut memainkan peran penting. SPSU muncul dan berkembang antara lain sebagai produk dari aktivitas pemberdayaan masyarakat oleh yayasan Sintesa, dan bahkan dalam perkembangan kemudian, SPSU lah yang menjadi titik sentral dari organ-organ gerakan petani di Sumatera Utara. Hal yang mirip juga berlaku untuk SPP yang dibentuk oleh para aktivis sosial dan aktivis mahasiswa bersama para petani. Pendirian dan keberadaan organisasi-organisasi pendukung atau pendamping gerakan petani di Jawa Barat (SPP) dan di Sumatera Utara (SPSU) merupakan suatu cara untuk menjaga vitalitas organisasi gerakan petani. Sedangkan kehadiran dan peran tokoh lokal terlihat cukup menonjol di dalam gerakan petani di Batang dan Pekalongan (Jawa Tengah). Tokoh lokal tidak hanya menjadi '*resource person*', melainkan menjadi pendamping dan bahkan pembela dari pencapaian tujuan-tujuan kolektif petani di Batang dan Pekalongan.

Keempat, bentuk pengorganisasian yang dipilih mendekati model politik akar rumput. Serikat-serikat petani dibangun di atas fondasi organisasi-organisasi akar rumput yang kuat melalui pembentukan OTL di level komunitas, dengan ragam kepentingan dan tuntutannya sendiri sesuai dengan konteks dan isu lokal masing-masing. Dari kasus SPP dan SPSU, misalnya, hirarki organisasi tampak ingin dihindari, karena dapat membenggu keluwesan gerak kolektif mereka. Struktur pengorganisaan ini terlihat tidak lagi mengikuti model pengorganisasian serikat buruh industri dan model politik kepartaian, yang umumnya memiliki hirarki organisasi yang cukup ketat dari atas ke bawah. Dari asosiasi di level lokal ini, pengorganisasian gerakan petani bertolak, yang untuk selanjutnya dirajut melalui pembentukan jaringan atau aliansi yang relative longgar di tingkat provinsial, nasional (FSPI), dan bahkan internasional.

Selanjutnya pada level internasional, telah terjalin jejaring yang main meluas melalui *La Via Campesina* yang mencakup serikat-serikat petani dari hampir semua negara di dunia. Melalui pelbagai kongres dan pertemuan yang digelar, serikat-serikat petani di seluruh dunia

menjalin kerjasama dan pertukaran sumberdaya lainnya. Lebih dari itu, mereka juga membangun solidaritas global sebagai suatu semangat yang menyatukan mereka dalam menghadapi pihak-pihak yang menghalangi pencapaian tujuan bersama mereka. Dengan cara itu, mereka sebenarnya tengah merajut sulaman '*global civil society*' yang kian membesar dan meluas. Dengan kekuatan dan sumberdaya jaringan kerja itu pula mereka memasuki arena pertarungan pembuatan agenda kebijakan global yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan mereka melalui sejumlah cara seperti ajuan pendapat tandingan, aksi-aksi demonstrasi hingga advokasi menentang kebijakan global (Keck & Sikkink, 1998).

Kelima, dalam hal taktik pencapaian tujuan bersama, disamping menempuh jalur di luar politik formal, mereka mulai menapaki jalur politik formal. Pada titik ini, gerakan petani di Indonesia bisa jadi mengambil rute lain dari GSB pada umumnya di negara maju yang lebih memilih saluran di luar politik formal. Sementara SPSU masih cenderung menapaki jalur-jalur di luar politik formal seperti demonstrasi dan protes yang dramatis dan direncanakan matang sebelumnya serta advokasi kebijakan, SPP dan FP2NBP telah mulai menempuh jalur politik formal dengan mempersiapkan para aktivis gerakan untuk merebut jabatan-jabatan politik formal yang memiliki posisi strategis dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama mereka. Namun demikian, sebagaimana tampak dari kasus FP2NBP, mereka memendam keraguan terhadap efektifitas jalur ini, terutama karena konteks perundangan partai politik di Indonesia yang tidak membolehkan munculnya calon-calon independen. Sementara di sisi lain, sangat tidak mudah untuk benar-benar menapaki jalur politik formal melalui pembentukan partai politik sebagaimana pernah ditempuh oleh Partai Hijau (*the green party*) di Jerman.

Keenam, dari sisi ideologi, gerakan sosial petani sebenarnya merupakan bentuk respon terhadap tendensi menguatnya institusi pasar (*the market*), yang bergandengan tangan dengan institusi negara (*the state*) telah menyebabkan proses marginalisasi kehidupan para petani. Meskipun yang sering muncul di media massa adalah aksi-aksi konvensional dan radikal dalam reclaiming tanah-tanah publik, mereka juga mencanangkan tujuan-tujuan kolektif untuk menentang liberalisasi perdagangan di sektor pertanian, dan untuk membangun

system pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Ekspresi ideologis yang paling eksplisit dinyatakan oleh FSPI dalam kaitan dengan isu sentral gerakannya: "sebagai organisasi perjuangan petani, dalam masa kebangkitan neoliberalisme dan neoimperialisme, FSPI telah menetapkan di garis depan dalam perjuangan melawan neoliberalisme khususnya liberalisasi pertanian".<sup>6</sup> Karena itu, gerakan sosial petani di Indonesia bisa dikatakan merupakan bagian dari gerakan anti-globalisasi (anti-globalization movement) yang akhir-akhir terus menguat (I. Wibowo, 2006; Francis Wahano, 2003).

Ketujuh, gerakan sosial petani tidak hanya melibatkan petani, melainkan juga partisipan dari berbagai latar profesi, etnis dan agama. Mereka acapkali disebut sebagai 'kelas menengah baru' (*the new middle class*), seperti aktivis pers, LSM/Ornop, akademisi, tokoh agama, dan aktivis hak asasi dan pejuang kemanusiaan lainnya. Dalam kaitan dengan penguatan gerakan sosial petani, mereka memiliki kontribusi yang besar dalam proses framing (pembingkaian) isu-isu yang diperjuangkan dan juga dalam proses pengorganisasian gerakan. Pembingkaian isu gerakan petani sebagai bagian dari perlawanan terhadap gelombang neoliberalisme di bidang pertanian antara lain merupakan kontribusi dari kalangan kelas menengah baru ini dalam mendukung gerakan petani. Kontribusi dari kalangan ini juga tampak nyata dari dokumen 'hak-hak asasi petani' yang merupakan produk kolaboratif antara akademisi-aktivis, aktivis LSM/Ornop pendamping petani, dan aktivis-aktivis serikat petani. \*\*\*\*\*

#### Daftar Pustaka

- Borras Jr, Saturnino M. (2004). *La Via Campesina, An Evolving Transnational Social Movement*, TNI Briefing Series, diterbitkan oleh Transnational Institute, No 2004/6.
- Fakih, Mansour. (2002). 'Social Movements sebagai Alternatif terhadap Civil Society.' *Jurnal Wacana*, Edisi 11.
- Faizah, Nurul (2004). *SPP, Advokasi Petani dengan Berdikari*. Jakarta: TIFA, PIRAC & CSSP.

---

<sup>6</sup>. Dikutip dari website FSPI, [www.fspi.or.id](http://www.fspi.or.id)

- Fauzi, Noer. (2005). *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.
- Giddens, Anthony. (1993). *Sociology*. Oxford: Polity Press
- IFG (International Forum on Globalization). (2003). *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*. Yogyakarta: CPRC
- Jary, David., and Julia Jary. (1991). *Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins Publishers.
- Keck, Margaret E. & Kathryn Sikkink. (1998). *Activists Beyond Borders, Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Madeley, John. (2005). *Loba, Keranjang Berdagang, Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*. Yogyakarta: CPRC
- Kusuma, N. & Fitria Agustina (penyunting). (2003). *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Nash, June (Ed.). (2005). *Social Movements, An Anthropological Reader*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Pichardo, Nelson A. (1997). 'New Social Movements: A Critical Review.' *Annual Review Sociology*, Vol.23, pp 441-30
- Singh, Rajendra. (2001). *Social Movements, Old and New, A Post-modernist Critique*. New Delhi: Sage Publication.
- Tarrow, Sydney. (1998). *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tjahjono, Subur, *Kompas*, 2, 3 dan 6 Februari 2006
- Topatimasang, Roem et.al. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: REaD Books.
- Wahono, Francis (ed.). (2005). *Hak-hak Asasi Petani dan Proses Perumusannya*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wahono, Francis. (2003). 'Petani dan Pertanian di Era WTO.' Dalam N. Kusuma & Fitria Agustina (penyunting), *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.

- Wahyudi. (2005). *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Studi Kasus Reklaiming/ Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Wibowo, I. (2006). 'Global Civil Society: Kekuatan Global Melawan Dampak Globalisasi.' *Basis* No. 01-02, Januari-Februari.
- Wibowo, I. & Fancis Wahono (editor). (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: CPRC
- Wikipedia, the free encyclopedia. Tanpa tahun. *Social Movement*. Didownload dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Social\\_movements](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_movements).

**Surat kabar dan majalah**

Berita Walhi online, 30 Juni 2005

Kompas, 23 September 2005

Pikiran Rakyat, 30 Juni 2005

Tempo Interaktif, 8 Juni 2004